

FUNGSI DAN KEBERADAAN KELURAHAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG KEBERSIHAN

(Studi Pada Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara)

SKRIPSI

OLEH

YUNI ARFINA

NPM : 08 851 0069

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2012

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **FUNGSI DAN KEBERADAAN KELURAHAN
DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DI BIDANG KEBERSIHAN (Studi
Pada Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai
Utara)**

Nama Mahasiswa : **YUNI ARFINA**

No. Stambuk : **08 851 0069**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

PEMBIMBING I

Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd

PEMBIMBING II

Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP

DEKAN

Drs. H. Iwan Nasution, S.Pd, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “FUNGSI DAN KEBERADAAN KELURAHAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG KEBERSIHAN (Studi Pada Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara)”.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd., MAP, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

- Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, bagi keduanya bakti dan doa penulis. Demikian juga bagi seluruh keluarga, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya. Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2012

Penulis

Yuni Arfina
NPM : 08 851 0069

DAFTAR ISI



halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Hipotesis	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Partisipasi	11
B. Fungsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	14
C. Pengertian Pembangunan Kelurahan	16
D. Pengertian Lingkungan Hidup	21
D. Tujuan Pembangunan Kelurahan	25
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Populasi dan Sampel	26
B. Metode Pengumpulan Data	27
C. Variabel dan Definisi Operasional	27
UNIVERSITAS MEDAN AREA Analisis Data	28

BAB IV. KELURAHAN JATI MAKMUR BINJAI UTARA.....	29
A. Keadaan Alam	29
B. Komposisi Masyarakat	30
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara.....	35
BAB V. ANALISIS DAN EVALUASI.....	43
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebersihan.....	43
B. Pelaksanaan Penataan Lingkungan di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara.....	48
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan dan Penataan Lingkungan Hidup.....	52
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan Nasional manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konteks pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia mengandung makna, bahwa pembangunan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di pedesaan yang merupakan kelompok terbesar rakyat Indonesia. Bahkan ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan dimaksud, yakni kesejahteraan masyarakat yang merupakan sasaran pokok dan strategi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di tanah air.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat sebagaimana ditekankan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 2011 bahwa :

Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat.¹

Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pembang-

¹ Departemen Penerangan RI, *Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 2011*, Jakarta.

unan ditingkat pusat saja tetapi juga dimaksudkan bagi segenap kegiatan pembangunan termasuk di Daerah.

Oleh karena itu sudah saatnyalah masyarakat yang bermukim di daerah yang masih mempunyai keterkaitan terhadap berbagai aspek kehidupan yang merupakan faktor penghambat terhadap partisipasinya, mendapat perhatian yang lebih serius dari pihak pemerintah selaku pemegang sentral dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Agustoha R. Kustawa mengemukakan bahwa :

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional umumnya dan pembangunan desa khususnya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila secara bertahap melalui pelaksanaan pelita-pelita yang berkesinambungan dalam satu kurun waktu tertentu dengan batasan sasaran yang meningkat.²

Kecamatan Binjai Utara merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Utara termasuk daerah yang menjadi sasaran pembangunan Nasional. Wilayah Kecamatan Binjai Utara ini secara khusus di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara. Pembangunan yang digalakkan di wilayah kelurahan ini adalah dititik beratkan pada kebersihan lingkungan.

Dengan demikian jelasnya bahwa masyarakat kelurahan adalah merupakan kelompok atau unit yang mempunyai pengaruh besar dalam rangka pelaksanaan pembangunan bangsa, yaitu pembangunan kelurahan tersebut merupakan basis atau ujung tombak pembangunan nasional.

² Agustoha R. Kustoha, *Managemen Pembangunan Desa*, Penerbit Grafindo, Jakarta, 2005,

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan manusia sudah termasuk perbuatan oleh sebuah perusahaan baik swasta maupun pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai jenis bahan kimia, zat radioaktif dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas mesin atau pabriknya cukup tinggi sehingga disadari atau tidak, ini akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya seperti pencemaran lingkungan melalui polusi udara, polusi air, serta kebisingan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Tidak semua masalah lingkungan di atas diangkat menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini yang salah satunya adalah masalah kebersihan. Kebersihan memiliki aspek yang sangat fundamental dalam membentuk kesehatan masyarakat, karena dengan lingkungan yang bersih maka akan didapatkan masyarakat yang sehat.

Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 yang mengatur tentang lingkungan hidup mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi dan peranan pemerintah sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang melalui instansinya

UNIVERSITAS MEDAN AREA mengawasi lingkungan hidup termasuk mengurus masalah

kebersihan ini.

Penataan kebersihan sebagai suatu ilmu pemerintahan *meletakkan* fungsi-fungsi pemerintah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup khususnya kebersihan, sehingga kedudukan yang demikian memberikan akibat bagi pemerintahan bahwa kepentingan rakyat banyak akan lingkungan hidup yang bersih, teratur merupakan suatu cerminan fungsi-fungsi pelaksanaan pemerintahan yang baik

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul : **FUNGSI DAN KEBERADAAN KELURAHAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG KEBERSIHAN (Studi Pada Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara).**

B. Perumusan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kekaburan, maka penelitian ilmiah harus dilengkapi dengan perumusan masalah. Perumusan masalah itu bertujuan agar masalah tersebut menjadi jelas hakekatnya, kedudukan serta sekaligus mencari alternatif untuk pemecahannya.³

Masalah menurut Mohammad Hatta adalah : “ Kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam “. ⁴

³ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, remadja Karya, Bandung, 2005, hal. 8.

⁴ Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 2009, hal. 12.

Sedangkan menurut Winarno Surakhmad, mengatakan :

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan semestinya apabila kita akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan“.⁵

Perumusan masalah adalah salah satu syarat untuk memakai prosedur ilmiah yang ditetapkan, sehingga akan mempermudah pengumpulan data yang relevan yang menjadi pokok pembahasan dari pelaksanaan program pembangunan kelurahan, maka dengan ini penulis merumuskan masalah yaitu “ Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan di kelurahan Jati Makmur Binjai Utara ”.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sangat penting dalam upaya mempermudah pengumpulan data pembahasannya bagi penulis. Adapun pengertian masalah adalah : kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya kita tidak puas dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam.⁶

Adapun yang menjadi batasan permasalahan untuk penelitian ini adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan.
2. Lokasi penelitian pada Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara.

⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2005, hal. 34.

3. Tahun penelitian dikumpulkan dari tahun 2011 – 2012.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlunya partisipasi masyarakat dalam memelihara pelaksanaan kebersihan lingkungan.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi serta menghambat pelaksanaan program pembangunan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.
- b. Untuk menguji kemampuan berfikir penulis dalam menuangkan penulisan skripsi.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan study di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

E. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa ahli memberikan batasan tentang pengertian partisipasi, yaitu Winardi berpendapat : “Turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan

UNIVERSITAS MEDAN AREA ~~UNIVERSITAS MEDAN AREA~~ adalah persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang

bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut”.⁶

Selanjutnya Talizidihu Ndraha menyatakan :

1. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan emosional. Kehadiran secara fisik semata-mata di dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam misalnya barang, uang, jasa, buah pikiran, keterampilan dan sebagainya.
3. Kesiediaan untuk bertanggung jawab.⁷

Berdasarkan defenisi tersebut diatas, jelaslah titik berat partisipasi dibidang pembangunan adalah masyarakat telah terlibat, baik mental, emosional maupun pribadi serta kesediaan masyarakat tersebut memberikan kontribusi atau sumbangan. Bentuk sumbangan tersebut antara lain : jasa, buah pikiran, keterampilan dan kesediaan masyarakat untuk bertanggung jawab.

Sedangkan pengertian masyarakat, penulis mengutip pendapat seorang ahli dibidang sosiologi, yaitu Hasan Shadily mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain “. ⁸

Dapat diketahui bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang terdiri dari berbagai golongan yang saling mempengaruhi.

⁶ Winardi, *Asas-Asas Managemen*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 79.

⁷ S.P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2009, hal. 2 dan 3.

⁸ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 2002, hal.

Sedangkan menurut Max Iver dan Page yang dikutip Soerjono Soekanto memberikan definisi masyarakat sebagai berikut :

Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah.⁹

Walaupun definisi yang diberikan para sarjana sosial tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya isinya adalah sama, yaitu masyarakat mencakup beberapa unsur antara lain :

1. Manusia hidup bersama, berarti orangnya minimum dua atau lebih
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tidak sama dengan kumpulan benda mati. Oleh karena manusia adalah bertambah, yang menghasilkan manusia-manusia baru yang dapat berbicara. Mereka juga berkeinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaan kepada teman-temannya. Sebagai akibat itu timbullah sistem komunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompoknya.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama untuk menimbulkan kebudayaan. Oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lain.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki untuk kesejahteraan seluruh rakyat baik yang berada di kota maupun

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, hal. 22.

di kelurahan.

S.P. Siagian mengemukakan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.¹⁰

Dari batasan-batasan tersebut di atas, berarti di bidang pembangunan masyarakat harus dilibatkan dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam rangka keberhasilan pembangunan.

Kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sangat diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan kelurahan pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat dengan pengarahan, bimbingan, bantuan, pembinaan dari pemerintah.

F. Hipotesis

Hadari Nawawi menyatakan : Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan riset, oleh karena itu hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar mungkin salah.¹¹

¹⁰ Taliziduhu, *Metodologi Pembangunan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2002, hal. 25.

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM, Yogyakarta, 2011, hal. 141.

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah. “Apabila partisipasi masyarakat meningkat, maka kebersihan lingkungan akan berhasil secara efektif dan efisien”.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Partisipasi

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Participation”, yang berarti mengambil bagian.

R.A. Santoso Sastro Poetro menyebutkan : “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”.¹²

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang, baik secara mental maupun fisik dalam suatu kegiatan kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung ataupun melaksanakan tercapainya tujuan-tujuan kelompok dan ikut sertanya mereka untuk bertanggung jawab.

Menurut Suwignjo , dalam bukunya *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, mengatakan bahwa : “partisipasi adalah sumbangan warga desa dalam setiap kegiatan pembangunan “. ¹³

Sedangkan menurut K. Davis, sebagaimana yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha, mengatakan bahwa :

¹² R.A. Santoso Poetro, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 13.

¹³ Suwignyo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 209.

“ Partisipasi didefinisikan sebagai suatu sikap mental dan emosional ke dalam situasi kelompok dengan kesediaan memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan kelompok dan kesediannya turut bertanggung-jawab “. ¹⁴

Dari kedua pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan individu selaku warga masyarakat, ke dalam kelompok kerjasama dengan memberikan sumbangan dalam bentuk pendapat, tanggapan, waktu, tenaga dan materiil lainnya. Dalam hubungan ini, Sumber Saparin mengingatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Janganlah warga masyarakat kelurahan dibiarkan terus-menerus di dalam ikatan tradisi yang menghambat kemajuan, perlulah diusahakan social reform yang serasi (pembangunan bidang mental spritual) sebagai landasan pembangunan masyarakat yang maju.
2. Mengembangkan partisipasi warga masyarakat kelurahan dalam arti formal dan informal sehingga merupakan kekuatan autoaktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam memecahkan persoalan bersama warga kelurahan yang bersangkutan, ialah pengorganisasian dan institusional kepentingan rakyat dalam organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial dan lain-lain.
3. Pembentukan dana masyarakat secara gotong royong mengingat bahwa pembangunan tidak harus dibiayai oleh Pemerintah, tetapi harus pula berlandaskan pada kesediaan warga masyarakat untuk menyediakan dana-dana yang diperlukan.
4. Menghilangkan adat istiadat/kebiasaan yang melemahkan perekonomian rakyat (upacara-upacara adat tradisonal yang kurang relevan dengan pembangunan). ¹⁵

¹⁴ Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2011, hal. 124.

¹⁵ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 43-44.

Mengingat semakin pesatnya pembangunan yang bertumpuk di wilayah kelurahan dan untuk lebih menjangkau kebutuhan dasar masyarakat dimana rencana pembangunan diproses dan disusun dari bawah (bottom-up planing), maka partisipasi masyarakat kelurahan harus benar-benar ditingkatkan.

Dengan adanya sistem perencanaan dari bawah tersebut lebih menekankan untuk menghimpun, menyerap, menyalurkan dan menyaring aspirasi yang berkembang dalam masyarakat berupa kebutuhan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Dalam hubungannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, menurut Suwignjo, dapat diwujudkan dalam bentuk :

1. Tenaga kerja di desa / kelurahan (manusia dan hewan)
2. Substitusi tenaga kerja, yaitu penggantian tenaga kerja manusia dengan uang
3. Bahan-bahan bangunan dan bahan makanan yang disumbangkan dapat dinilai dengan uang
4. Barang atau hasil bumi, yang sesuai dengan musyawarah dapat dilelang untuk dijadikan uang
5. Dan lain-lain.¹⁶

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pada akhirnya diharapkan tumbuhnya rasa memiliki, sehingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dapat dijamin.

Sesuai dengan pendapat para ahli bahwa partisipasi dapat dibagi atas beberapa jenis, tergantung kepada subjek dan objek yang dilaksanakan.

Menurut S.P. Siagian partisipasi dapat dibagi atas partisipasi pasif dan partisipasi aktif.¹⁷

Partisipasi pasif dapat dibagi atas :

1. Sikap dan
2. Prilaku

Sedangkan partisipasi aktif dapat dibagi dalam bentuk :

1. Turut memikirkan nasib sendiri dengan pemanfaatan lembaga sosial politik.
2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi.
3. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
4. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama.

Selanjutnya Mitfah Thoha jenis partisipasi dapat dibagi atas :

1. Partisipasi Buah Pikiran,
2. Partisipasi Keterampilan
3. Partisipasi Tenaga
4. Partisipasi Harta Benda
5. Partisipasi Uang.¹⁸

B. Fungsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dewasa ini memang merupakan suatu problem yang perlu mendapat perhatian tersendiri.

¹⁷ S.P. Siagian, *Proses Pengelola dan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hal. 33.

¹⁸ Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 2004, hal. 73.

J. Wayong mengatakan : Fungsi adalah sekelompok kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang erat untuk menyelenggarakan segi-segi tugas pokok.¹⁹

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan. Ikut sertanya masyarakat bila melalui beberapa tingkatan-tingkatan yang paling tinggi di mana masyarakat secara aktif ambil bagian dalam suatu pembangunan.²⁰

Sedangkan partisipasi adalah penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja ke dalam situasi kelompok yang mendorong agar mereka menyumbang kemampuannya ke arah tujuan kelompok yang bersangkutan.²¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi mencakup :

1. Penyertaan pikiran dan perasaan,
2. Usaha-usaha untuk memberikan dorongan kepada bawahan untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga daya kemampuan berpikir secara kreatif dan prakarsa dapat diambil serta diputuskan untuk diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.
3. Mendorong bawahan untuk ikut serta bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan kelompok.

¹⁹ J. Wayong, *Fungsi Administrasi Negara*, Djambatan, 2011, hal. 120.

²⁰ Ghajali, *Menggalakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan*, Socilia, Jakarta, 2009.

²¹ Pariata Westra, *Hubungan Kerja Kemanusiaan*, Balai Pembinaan Administrasi UGM,

Tegasnya partisipasi tidak hanya merupakan kegiatan fisik dari masyarakat semata-mata dan dilakukan bukan karena paksaan, melainkan dengan rasa kesadaran agar memberikan suatu tanggung jawab bagi mereka.

C. Pengertian Pembangunan Kelurahan

1. Pembangunan

Menurut Talizuddin Ndraha pembangunan dapat diartikan sebagai “ usaha yang diselenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan di segala bidang dalam rangka mencapai tujuan negara dan bangsa “²²

Sedangkan Sondang P. Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai “ suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa “. ²³

Berbicara mengenai pembangunan maka kita harus mengerti apa arti pembangunan. Pembangunan adalah perubahan keadaan yang lebih baik dilaksanakan secara sadar dan terus menerus.

Hakekat daripada pembangunan itu sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Disini jelas

²² Talizuddin Ndraha , *Pengertian Desa dan Pembangunan Desa*, Yayasan Karya Darma II, Jakarta, 2007, hal 35.

²³ Sondang P. Siagian, *Op.Cit*, hal. 2.

terlihat bahwa pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dalam ikatan bangsa Indonesia yang mencerminkan situasi tersebut.

Dilihat dari uraian di atas dapatlah digambarkan betapa luasnya bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dan memerlukan partisipasi dari sebanyak mungkin seluruh penduduk Indonesia.

Tetapi kadang kala perubahan tidak dilihat dari segi aspek lingkungan masyarakat tersebut, misalnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sehingga Pembangunan yang ditetapkan itu hanya berlaku di dalam konsep, dan segala yang dicita-citakan itu hampa adanya.

Oleh sebab itu berhasilnya Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara.

Dapat diterangkan lebih lanjut bahwa proses ini bukan merupakan proses yang mudah dan tidak tanpa gejolak maupun perasaan yang sering emosional, mengingat bahwa titik tolak Pembangunan bangsa ialah suatu bentuk Bhinneka, dengan perbedaan dalam kebiasaan maupun tata nilai kelompok masyarakat. Adapun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bukanlah suatu kegiatan yang asal jadi ataupun meniru dan mengikuti mode pembangunan yang dilaksanakan di negara lain melainkan sungguh-sungguh didorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dan martabat masyarakat Indonesia.

Hal inilah yang merupakan cita-cita dari mendirikan Negara Kesatuan RI dalam Tahun 1945. Karena itu pula kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan bagian integral dari perjuangan bangsa Indonesia.

Keinginan untuk merdeka sangat erat hubungannya akan adanya suatu citra tentang masa depan, suatu citra diri bangsa Indonesia, yang ditentukan oleh pengalaman masa lampau.. Sejak semula para ahli menyadari bahwa manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, dan sehubungan dengan itu terbentuklah suatu citra tentang masa depan yang menjadi pendorong bagi kegiatan manusia selanjutnya.

Kita juga mengetahui bahwa pembangunan mempunyai tujuan yaitu terdiri dari jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan untuk melaksanakan pembangunan itu diperlukan adanya kemampuan untuk melaksanakannya.

Adapun kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, yang terdiri dari beberapa variabel yaitu :

- a. Kepemimpinan
- b. Struktur organisasi
- c. Sarana dan fasilitas yang terbagi atas :
 - 1) Sarana fisik
 - 2) Biaya
 - 3) Skill
 - 4) Peraturan-peraturan dan perundangan yang melandasi tata kerja kegiatan organisasi.



UNIVERSITAS MEDAN AREA digunakan oleh organisasi yang bersangkutan di dalam

proses pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan bukan saja sebagai perubahan tetapi juga sebagai :

- a. Sebagai suatu proses evolusi.
- b. Mencakup bidang materi dan non materi yang dihubungkan dengan kemajuan teknologi.
- c. Pemikiran tentang pembangunan sebagai suatu arah gerak yang penting dalam kemajuan pembangunan secara bertahap.
- d. Adanya keterbatasan dalam pembangunan di sektor ekonomi disebabkan keterbatasan daya tampung lahan ekonominya.

2. Pembangunan Kelurahan

Pembangunan kelurahan merupakan bagian dasar dari pembangunan nasional, yang diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusianya dengan meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa dengan bimbingan atau bantuan dari aparatur pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing serta mengembangkan partisipasi seluruh masyarakat.

Derasnya laju pembangunan di Kelurahan adalah pencerminan dari kegiatan, kelincahan dan adanya inisiatif, keterampilan kelurahan dengan menggabungkan bantuan pemerintah dengan membangkitkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya di

Taliziduhu Ndraha memberikan kesimpulan mengenai pembangunan desa sebagai berikut : Pembangunan desa sebagai suatu proses di dalam dana masyarakat desa berkenan mengambil bagian secara aktif, atau dengan perkataan lain berpartisipasi dan pemerintah memberikan bimbingan pengarah dan bantuan.²⁴

Dari pengertian tersebut berarti masyarakat harus berperan secara aktif, karena masyarakat merupakan objek dan subjek dari pembangunan.

Pembangunan kelurahan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat di kelurahan yang terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan dari pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing. Karena pembangunan kelurahan begitu kompleks, maka dalam pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan kelurahan merupakan landasan dari kekuatan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan kelurahan juga dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional karena pembangunan kelurahan dengan berbagai permasalahannya dialami sebagian besar rakyat Indonesia yang berada di pedesaan.

Mutawali menyatakan : pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama swadaya gotong royong masyarakat meliputi semua aspek kehidupan yang dikoordinir

²⁴ Taliziduhu Ndraha, *Hubungan Antara Partisipasi dan Tanggung Jawab Terhadap Hasil-Hasil Pembangunan*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2011, hal. 120.

oleh kepala desa.²⁵

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kelurahan adalah uasha dan kegiatan pembaharuan dan pembangunan yang berlangsung di dkelurahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan segenap masyarakat yang bersangkutan dalam segala aspek kehidupan untuk mewujudkan tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

D. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan merupakan terjemahan dari istilah “ *Enverenment* “ dalam Bahasa Inggeris atau “ *I'environment* “ dalam Bahasa Perancis, “ *Umwelt* “ dalam Bahasa Jerman “ *Millieu* “ dalam Bahasa Belanda, “ Alam sekitar “ dalam Bahasa Malaysia “. ²⁶

Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup selalu mempergunakan istilah lingkungan hidup di dalam berbagai ketentuan .

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 mengatakan lingkungan hidup adalah “ kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain “.

²⁵ Mutawali, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, Ditbangdes Prop. Dati II Jabar, Bandung, 2009, hal. 2.

²⁶ Abdurrachman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 6.

Dari hasil seminar segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup, terdapat pendapat : “ Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya “. ²⁷

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup adalah :

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti, faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain. ²⁸

Yang mengganggu keserasian, keselarasan dan keseimbangan perlu ditanggulangi karena semua itu tiada akhirnya akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Mengingat banyak permasalahan yang terdapat dalam lingkungan hidup ini, maka untuk memahami aneka permasalahan yang ada perlu adanya pendekatan yang membatasi diri pada satu kajian khusus tentang lingkungan. Sekarang ini yang diperlukan adalah “ Pendekatan yang bersifat lintas sektor multidisipliner, transdisipliner pendekatan yang sejenis itu “. ²⁹

²⁷ BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hal. 2.

²⁸ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2002, hal. 15.

²⁹ Abdurrahman, *Pengembangan Azas dan Sistem Hukum Lingkungan*, Makalah pada Konferensi Puset Study Lingkungan Seluruh Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 1.

Selanjutnya Munadjat Danusaputro, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman berpendapat, Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya “.³⁰

Demikian juga Otto Soemarwoto mengemukakan pendapat :

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teori ruang itu tidak terbatas jumlahnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam, seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas yang tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.³¹

Selanjutnya beberapa ahli mengadakan pengelompokan lingkungan atas beberapa macam, secara umum dapat digolongkan atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Lingkungan fisik (Physical Environment).

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita, yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

2. Lingkungan Biologis (Biological Environment).

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa golongan organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang,

³⁰ Ibid, hal. 67.

³¹ Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Makalah pada Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, BPHN, Bina Cipta Bandung, 2007, hal. 30.

tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lainnya.

3. Lingkungan Sosial (Social Environment).

Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah negara Republik Indonesia, menurut penjelasan umum Undang-Undang 23 Tahun 2007, lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah negara ataupun wilayah administratif. Akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut, karena itu jelas bahwa konsep ekologi semata, akan tetapi juga merupakan konsep hukum dan politis.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk hidup dan untuk meningkatkan kehidupan manusia membutuhkan air, udara, energi, mineral, kayu dan serat untuk kebutuhan hidup, ketersediaan bahan-bahan itu tergantung pada mutu lingkungan, berarti lingkungan itu merupakan sumber daya yang memenuhi kebutuhan kita sebagai bahan produksi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan. Suatu ekosistem yaitu lingkungan tetap berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu sama lainnya. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya pada hakekatnya adalah melakukan perubahan-perubahan di dalam satu ekosistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh jaringan kehidupan.

Dengan demikian lingkungan hidup itu selalu berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun daya alam.

E. Tujuan Pembangunan Kelurahan

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju tujuan yang ingin dicapai.

Pada dasarnya pembangunan kelurahan mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk meningkatkan kondisi kehidupan di kelurahan yang selanjutnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada taraf hidup permulaan pemerintahan membangun, berbagai sarana, prasarana dan fasilitas-fasilitas lainnya.

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desanya, terutama partisipasi masyarakat.

Tujuan-tujuan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya, sehingga tercapainya tujuan yang satu akan menunjang tercapainya tujuan yang lain.

Oleh karena itu usaha untuk mencapai tujuan tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sample

Populasi merupakan keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan di duga sedangkan sample bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Sugiono di dalam bukunya metode penelitian Administrasi. Menyatakan bahwa populasi adalah obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³²

Sedangkan sample Suharsini Arikunto menyatakan : Sample adalah sebagai atau mewakili populasi yang diteliti".³³

Adapun yang menjadi populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 7 orang pegawai Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara yang berjumlah 7 orang ditambah 15 orang penduduk yang mewakili dari seluruh jumlah populasi yang ada.

Teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah secara acak sederhana, artinya sampel diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 51.

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hal. 102.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan.

1. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari atau mengumpulkan keterangan atau bahan dari buku yang berhubungan dengan masalah yang di tulis pada penelitian.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, dengan cara melakukan observasi ke lapangan, wawancara dengan lurah dan dengan beberapa penduduk yang dianggap perlu yang mengetahui objek yang diteliti.

C. Variabel dan Defenisi Operasional

Adanya variabel dalam suatu penelitian akan menentukan adanya hubungan secara sistematis. Dalam penelitian ini akan dikemukakan dua variabel yaitu :

1. Variabel Bebas (independent variabel)

Yaitu variabel yang disangka atau dianggap sebagai sebab dari suatu gejala atau variabel yang diselidiki pengaruhnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah : Partisipasi Masyarakat dengan indikatornya :

- a. Ikut serta membayar retribusi kebersihan
- b. Ikut serta dalam program kebersihan yang dijalankan kelurahan.

2. Variabel Terikat (dependent variabel)

Yaitu yang di duga akan timbul sebagai pengaruh variabel bebas atau yang di

sangka. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah, kebersihan lingkungan, dengan indikatornya :

- a. Kebersihan rumah tangga
- b. Kebersihan lingkungan.

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

- a. Ikut serta membayar retribusi kebersihan adalah suatu bentuk kewajiban dari masyarakat dalam hal pelaksanaan kebersihan.
- b. Ikut serta dalam program kebersihan yang dijalankan kelurahan adalah program-program yang isusun oleh pihak kelurahan dan masyarakat terlibat di dalamnya.
- c. Kebersihan rumah tangga adalah kebersihan yang dijalankan dan diterapkan dalam suatu rumah tangga.
- d. Kebersihan lingkungan merupakan tindakan bersama dari sekumpulan masyarakat untuk menjalankan kebersihan di sekitarnya.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif yang terjadi kepada keadaan yang sekarang ini, dengan jelas mengumpulkan data, menyusun dan menganalisisnya.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

BAB V

ANALISIS DAN EVALUASI

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebersihan

Dalam menguraikan analisis dan evaluasi terhadap pembahasan isi skripsi ini penulis bertitik tolak dari kegiatan-kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh unsur masyarakat yang ditopang oleh unsur pemerintahan di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara tersebut, baik itu pelaksanaan usaha-usaha yang dapat mendukung tingkat kebersihan masyarakat seperti pelaksanaan gotong royong, pemeliharaan sarana-sarana kebersihan maupun penyuluhan tentang pentingnya kebersihan.

Kegiatan ini terfokus kepada sifat dilaksanakan gotong royong di dalam kelurahan dimana dengan dilaksanakan gotong royong tersebut maka fasilitas-fasilitas sarana kebersihan yang ada di kelurahan tersebut dapat dipakai dengan semaksimal mungkin. Dalam hal ini dapat disebutkan dengan adanya kegiatan gotong royong maka pekerjaan dihubungkan dengan pelaksanaan kebersihan dapat lebih ringan dilakukan bersama begitu juga dengan perbaikan-perbaikan saluran air. Pelaksanaan gotong royong dikatakan oleh penulis sebagai bentuk sarana nyata dalam partisipasi masyarakat dalam kebersihan adalah dengan dilaksanakannya gotong royong maka masyarakat secara bersama-sama memberikan bhaktinya bagi peningkatan kebersihan di kelurahan dimana masyarakat tersebut hidup.

Dari hasil penelitian di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 permasalahan kebersihan di kelurahan ini pada dasarnya hanya sebatas masalah

pengelolaan sampah semata.

Sebagai suatu wilayah yang terletak di tengah kota maka perihal pengelolaan sampah pada lokasi penelitian ini dikelola oleh PD. Pasar Binjai Utara. Sehingga dalam hal ini pada dasarnya masyarakat Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara di bidang kebersihan khususnya lingkungannya telah diserahkan pengelolaannya pada suatu instansi tertentu, dimana dengan adanya instansi tersebut maka masyarakat hanya melakukan pengelolaan kebersihan di rumah tangganya sendiri. Setelah masyarakat mengelola sampahnya maka sampah tersebut diletakkan pada tempat-tempat pengumpulan sampah yang selanjutnya dikutip oleh Dinas Kebersihan dan diangkut kepada pembuangan akhir.

Secara gamblang partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam hal uraian di atas adalah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam membentuk membayar retribusi pengangkutan sampah. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan khususnya dalam bidang retribusi pelayanan kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah Binjai Utara No. 8 Tahun 2002. Dimana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini ditentukan hal-hal yang utama yaitu meliputi :

1. Jalan utama, kolektor dan jalan lingkungan yaitu jalan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
2. Jalan umum adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
3. Sampah adalah sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda cair yang tidak

di jalan umum.

4. Sampah khusus dan proses produksi non B3 adalah sampah yang bersumber dari tempat-tempat usaha yang bersifat komersil termasuk dari bongkaran bangunan dan potongan pemangkasan pohon.

Sebagai instansi yang memiliki tugas di bidang kebersihan maka Dinas Kebersihan Binjai Utara memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal :

1. Membersihkan sampah di jalan umum yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah,
2. Mengumpulkan sampah dan sampah khusus dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara (TPS),
3. Menyediakan tempat pembuangan sementara untuk pelayanan umum,
4. Mengangkut sampah/sampah khusus dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.
5. Menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pemusnahan sampah.
6. Memusnahkan sampah/sampah khusus di tempat pembuangan akhir,
7. Melakukan penyedotan, pengangkutan tinja dari Septictank ke instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT).

Sebagaimana disebutkan di atas maka pada dasarnya sebagai suatu wilayah yang terletak di tengah perkotaan maka partisipasi masyarakat yang diberikan adalah dalam bentuk kerjasama agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik serta melakukan pembayaran retribusi dari pengelolaan sampah itu sendiri. Secara sederhana partisipasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
tersebut dapat diberikan sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)1/9/23

1. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan masing-masing dan saluran air di sekelilingnya,
2. Memelihara dan merawat pagar mati dan pagar hidup,
3. Mengumpul dan memasukkan sampah pada wadah yang disediakan sendiri dan diletakkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh petugas kebersihan,
4. Bagi warga yang tinggal di gang-gang yang tidak dapat dilalui oleh armada pengangkutan sampah langsung menempatkan sampahnya yang sudah dikemas ke tempat penampungan sampah sementara yang telah ditentukan,
5. Setiap pedagang harian tidak menetap dan pedagang keliling diwajibkan untuk mengumpulkan sampah yang dihasilkan dalam satu wadah tertentu dan menempatkannya ke tempat pembuangan sementara yang telah disediakan oleh pemerintah daerah,
6. Setiap pengusaha kendaraan angkutan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan dan kemudian membuang sampahnya di tempat pembuangan sementara yang telah disediakan di terminal-terminal atau yang disediakan oleh instansi pengelola persampahan di tempat-tempat tertentu.
7. Setiap orang pribadi atau badan yang sedang melakukan kegiatan pembangunan harus memelihara kebersihan dan tidak menempatkan bahan material bangunan pada badan jalan atau trotoar,
8. Setiap orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab, memiliki dan atau menghuni bangunan di Binjai Utara wajib membayar retribusi sampah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

9. Memberikan informasi kepada pemerintah tentang pelanggaran-pelanggaran yang mencemarkan kebersihan lingkungan,
10. Bagi pemilik tanah kosong wajib membersihkan dan merawat lahannya.

Sewaktu hal-hal yang dapat menimbulkan partisipasi di atas dipertanyakan kepada responden maka didapatkan jawaban sebagai berikut :

Tabel 6

Tingkat Partisipasi Responden Dalam Pengelolaan Kebersihan

No.	Uraian	n	%
1.	Membayar retribusi	12	80,00
2.	Membuang sampah pada tempatnya	3	20,00
3.	Ikut serta dalam gotong royong	-	-
4.	Menyerahkan kebersihan pada petugas	-	-
Jumlah		15	100,00

Sumber : Hasil Angket

n = 15

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden terlihat memandang arti partisipasi masyarakat dalam bidang kebersihan hanya semata-mata membayar retribusi semata yaitu sebesar 80% dari total sampel. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat yang dijadikan sampel penelitian ini adalah masyarakat perkotaan sehingga efektivitas dari pola dan tingkah laku mereka adalah mencari yang efisien. *Pandangan ini* memungkinkan karena dengan membayar retribusi maka permasalahan kebersihan di lingkungan mereka menjadi selesai.

Dalam tabel di atas terlihat prinsip-prinsip hidup gotong royong juga semakin tipis bagi masyarakat perkotaan karena tidak ada satu orangpun responden memilih

partisipasi mereka dalam masalah kebersihan dengan tindakan gotong royong.

B. Pelaksanaan Penataan Lingkungan di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara

Sebelum lebih lanjutnya menguraikan tindakan-tindakan penataan lingkungan hidup oleh instansi terkait baik itu oleh pihak kelurahan maupun juga pihak Pemerintah Binjai Utara, maka terlebih dahulu diuraikan tentang timbulnya kegiatan penataan lingkungan hidup itu sendiri di wilayah kelurahan yang terdiri dari beberapa lingkungan.

Masyarakat yang merupakan penduduk di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara lebih besar memiliki mata pencaharian di sektor swasta dan berdagang. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara tidak ada aktivitas industri yang merusak lingkungan hidup, sehingga dengan keadaan tersebut maka aparatur pemerintahan di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara dan Pemerintah Binjai Utara tidak memiliki program kerja di bidang penataan lingkungan hidup, demikian juga masyarakatnya.

Permasalahan lingkungan hidup pada wilayah Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara pada kenyataannya tidak merupakan permasalahan serius, tetapi dikarenakan letaknya yang berada di tengah Binjai Utara, maka dampak tersebut berpengaruh nyata pada masalah lingkungan di Kelurahan tersebut. Dampak tersebut pada kenyataan berada di sektor pengangkutan dan juga kegiatan industri. Pengangkutan adalah sektor yang utama di wilayah Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara sebagai salah satu sebab

UNIVERSITAS MEDAN AREA
tercemarnya di lingkungan, selain faktor manusianya sendiri.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (Repository.uma.ac.id)1/9/23

Hal yang sangat mendasar dewasa ini yang sangat riskan bagi pencemaran lingkungan di wilayah Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara adalah perkembangan kehidupan masyarakatnya sendiri. Pengaruh komponen alam dan komponen sosial dan hasil atau akibat terhadap keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat pada masyarakat yang mengandalkan hidupnya pada kegiatan yang dilakukannya. Masyarakat Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara adalah masyarakat kota, dan dalam mencari nafkah maka sebagian besar penduduk juga mengandalkannya dari sektor swasta

Kehidupan masyarakat kota ini dapat dilihat dalam bentuk :

- Hidup menetap dekat tempat kerjanya.
- Berusaha menyerap teknologi baru yang berkaitan dengan kehidupan,
- Tingkat populasi rendah, karena kesibukan-kesibukan.
- Hidup lebih safe dalam bentuk tabungan, deposito dan asuransi,
- Kurang komunikasi dengan lingkungannya.

Dengan memandang kualitas lingkungan sebagai derajat kemampuan lingkungan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang hidup di dalam suatu daerah termasuk di wilayah Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara, dapatlah diketahui bahwa kualitas lingkungan yang terdapat di lingkungan Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara yang sebagian besar penduduknya di sektor swasta dikategorikan tinggi, hal ini disebabkan di wilayah kelurahan ini pada kenyataannya perekonomiannya sudah sedikit maju dari wilayah lainnya karena terletak pada sental kota. Hal ini terbukti dengan melihat kenyataan bahwa banyaknya penduduk yang melakukan aktivitasnya

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

di siang hari, pendidikan yang tinggi, tingkat kesehatan tinggi, dan pelayanan kesehatan sangat memadai. Tetapi umumnya karena kondisi kehidupan di negara Indonesia maka sektor-sektor lapangan pekerjaan terbatas dan kesempatan untuk memutuskan hal-hal yang menentukan nasib dirinya, keluarga dan masyarakat adalah sempit dan bahkan semakin menyempit.

Memandang kenyataan di atas maka pada dasarnya masyarakat Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara menyadari lingkungan sebagai bagian dari kesatuan masyarakat itu sendiri, hanya saja tanpa mereka sadari lingkungan tersebut semakin menyempit sehingga lahan dipergunakan secara maksimal bagi kegiatan di sektor industri. Upaya-upaya lain juga dilakukan agar hasil industri semakin meningkat, dimana hal ini nyata-nyata akan berakibat terganggunya ekosistem di daerah tersebut yang berakibat tercemarnya lingkungan.

Perihal pelaksanaan penataan lingkungan oleh aparat pemerintah melalui Kantor Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara dan Pemerintah Binjai Utara pada dasarnya belum menampakkan kegiatan yang sama sekali dapat disebut sebagai kegiatan penataan. Aparat pemerintahan dalam kegiatan sehari-harinya lebih terfokuskan kepada kegiatan tertib administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, Kartu Rumah Tangga, Pajak Bumi dan Bangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam penataan kependudukan.

Penataan lingkungan belum dijadikan kegiatan utama dari aktivitas pemerintahan pada Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara dikarenakan belum adanya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
suatu kegiatan yang nyata dari aktivitas-aktivitas perorangan maupun badan usaha

yang menyangkut perusakan lingkungan hidup, sehingga dengan keadaan tersebut belum dianggap penting bagi aparat pemerintah untuk mewujudkan kebijaksanaan khusus dalam hal pelaksanaan penataan lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian di Kantor Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara diketahui aktivitas –aktivitas penataan lingkungan hidup yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara dan Pemerintah Binjai Utara pada dasarnya hanya sebatas dalam bentuk-bentuk penyuluhan kebersihan lingkungan serta memfungsikan jabatan-jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Binjai Utara, seperti Dinas Kebersihan sebagai ujung tombak bagi penataan lingkungan di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara khususnya dan umumnya di Binjai Utara.

Tetapi kenyataan yang didapatkan di atas berlainan dengan jawaban responden terhadap angket yang ditanyakan yaitu :

Tabel 7

Pelaksanaan Penyuluhan Kebersihan Lingkungan Oleh Aparatur Kelurahan dan Pemerintah Binjai Utara

No.	Uraian	N	%
1.	Sering	-	-
2.	Jarang	-	-
3.	Tidak pernah	15	100,00
	Jumlah	15	100,00

Sumber : Hasil Angket

n = 15

Dari tabel di atas terlihat bahwa jawaban responden yaitu masyarakat berbeda dengan jawaban petugas kelurahan. Dari jawaban responden di atas terlihat bahwa

aparat pemerintah Binjai Utara dan pemerintah Binjai Utara tidak

pernah melakukan penyuluhan perihal kebersihan lingkungan, sehingga terlihat pada dasarnya penataan lingkungan hidup di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara semata-mata diserahkan pada Dinas Kebersihan Binjai Utara semata.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan dan Penataan Lingkungan Hidup

Telah diterangkan sebelumnya bahwa partisipasi yang diartikan oleh masyarakat yang menjadi objek penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara adalah pelaksanaan kewajiban membayar retribusi sampah. Sedangkan tingkat gotong royong di kelurahan ini sangat rendah sekali. Sebagai alasan yang dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat yang menjadi tolak ukur penelitian ini adalah masyarakat perkotaan sehingga prinsip-prinsip kehidupan bersama dalam suatu lingkungan ditinggalkan. Hanya sebagian masyarakat yang tinggal pada gang-gang di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara yang masih merasakan kebersamaan sebagai suatu prinsip kehidupan.

Dengan aktivitas tersebut maka terlihat bahwa meskipun di satu sisi partisipasi dalam bidang kebersihan khususnya dalam kehidupan bersama dapat dikatakan rendah tetapi dalam melakukan kewajibannya membayar retribusi mereka tinggi.

Bahkan dalam penelitian ini dapat dikatakan kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan kebersihan bukan datang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dari mereka sendiri tetapi dari aktivitas-aktivitas pembangunan yang direncanakan

oleh Pemerintah sendiri, seperti adanya proyek kabel bawah tanah, sehingga terjadi gundukan-gundukan tanah di sana-sini dan mengakibatkan air tergenang di dalam suatu tempat tertentu. Belum lagi adanya proyek saluran air seperti penggantian saluran air yang masih baik dan dirubah menjadi saluran air yang baru. Pekerjaan-pekerjaan ini memberikan suatu kondisi bagi terganggunya kebersihan lingkungan. Dan hal tersebut bukan datangnya dari masyarakat tetapi dari pemerintah sendiri.

Membicarakan masalah kebersihan dalam ilmu sosial tidaklah sedemikian sempitnya, banyak aspek yang dapat dikaitkan dengan permasalahan kebersihan ini yang salah satunya adalah permasalahan lingkungan. Di sisi lainnya lingkungan bukan pula sekedar hal-hal yang berada di sekeliling kita tetapi lebih luas dari hal tersebut yaitu yang menyangkut hal-hal yang menjadi perubahan pola dan keberadaan kita pada suatu lingkungan. Jadi kebersihan bukan hanya persoalan lingkungan dan lingkungan bukan persoalan kecil tetapi sangat luas, yang meliputi manusia dan area yang mengelilinginya.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa penataan lingkungan oleh Kantor Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara belum dijadikan titik sentral kegiatan pemerintahan karena belum adanya tindakan-tindakan perorangan maupun badan usaha yang berakibat kepada perusakan lingkungan hidup di wilayah kelurahan tersebut.

Tetapi meskipun demikian bukan tidak ditemui keadaan-keadaan sebagai bentuk permasalahan dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang secara tidak langsung dapat merusak lingkungan.

Permasalahan tersebut dapat diuraikan berikut ini :

1. Dampak tidak langsung dari kegiatan industri dan teknologi

Dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia berupaya dengan segala daya untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada demi tercapainya kualitas hidup yang diinginkan. Kekayaan yang tersembunyi dalam komponen sosial berupa akal pikiran dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan cara pencapaian sasaran tersebut. Melalui akal pikiran manusia menciptakan peralatan baru yang berupa mesin-mesin dan alat-alat bantu lainnya yang berteknologi tinggi, untuk dapat menghasilkan produk yang melimpah dalam waktu yang singkat.

Pemakaian mesin dan peralatan baru dalam bidang industri serta pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan produk yang tinggi diharapkan akan dapat mencapai sasaran kualitas hidup manusia yang lebih baik. Dengan mempergunakan mesin dan peralatan berteknologi tinggi manusia dapat mengeruk kekayaan alam secara besar-besaran. Tambang-tambang baru dibuka untuk mencari mineral-mineral yang sangat dibutuhkan, kemudian dikirim ke industri-industri untuk diolah sehingga menjadi barang jadi.

Kegiatan tersebut dari hari ke hari semakin meningkat, seolah-olah sasaran yang hendak dicapai, yaitu peningkatan kualitas hidup, sudah makin dekat untuk tercapai. Namun dalam kenyataannya kualitas hidup yang hendak dicapai terasa masih sulit dijangkau, bahkan mungkin terasa makin jauh dari jangkauan. Hal ini tak lain

disebabkan oleh dampak industri dan teknologi terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Dampak terhadap lingkungan dapat mengurangi daya dukung alam yang berarti akan mengurangi kemampuan alam untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Sedangkan dampaknya terhadap manusia, jelas akan mengurangi atau bahkan dampaknya terhadap manusia, jelas akan mengurangi atau bahkan mungkin akan menurunkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu dampak industri dan teknologi perlu kiranya untuk dicermati dan diperhatikan sebaik-baiknya.

Memperhatikan dan mencermati masalah dampak industri dan teknologi juga merupakan suatu usaha untuk mencari penyelesaian teknologi juga merupakan suatu usaha untuk mencari penyelesaian masalah bagi tercapainya keinginan untuk mendapatkan kualitas hidup dan kenyamanan hidup yang lebih baik. Industri dan teknologi memang diperlukan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik namun kalau dampak yang ditimbulkannya semakin menjauhkan manusia dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik, sudah barang tentu hal itu tidak boleh terjadi.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya di Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara belum ada kegiatan industri dan teknologi yang dapat mengganggu kualitas hidup masyarakatnya, tetapi dari perkembangan teknologi dan industri di Binjai Utara memberikan akibat bagi Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara yang secara tak langsung memiliki akibat yaitu sebagai berikut :

a. Urbanisasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Masyarakat Pedesaan di luar Binjai Utara yang semula bekerja pada bidang

Document Accepted 1/9/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)1/9/23

pertanian, namun karena adanya daya tarik industri di Binjai Utara, berpindah ke daerah industri tersebut. Karena mereka tidak berbekal keahlian, maka kepindahan mereka ke daerah industri untuk sekedar menjadi tenaga kerja (buruh) kasar. Sebagai tenaga kasar sudah barang tentu penghasilan mereka hanya pas-pasan, sekedar untuk dapat bertahan hidup. Perpindahan masyarakat dari desa ke kota menyebabkan jumlah penduduk kota semakin besar.

b. Perilaku.

Suasana kota yang selalu dikejar oleh waktu, hiruk-pikuk, bising dan pemandangan yang tidak hijau, menyebabkan manusia menjadi tegang. Perilaku mereka yang semula ramah dan bersahabat, karena adanya ketegangan dalam dirinya, menjadi berubah kasar. Perilaku yang semula suka tolong-menolong berubah menjadi acuh tak acuh.

c. Kriminalitas.

Kegiatan industri dan teknologi pada umumnya memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu. Tenaga kerja yang ada pada umumnya masih belum mempunyai keahlian yang dimaksud. Para pencari kerja membutuhkan lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Padahal persaingan kerja sangat ketat sehingga untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih sulit. Pada sisi lain, masyarakat kota yang kaya dan konsumtif memberikan gambaran yang seolah-olah hidup itu serba enak. Di antara mereka ada yang tidak mau bekerja keras. Ada sementara pencari kerja yang berusaha mencari pekerjaan namun setelah

hidup mewah dan bersenang-senang. Keadaan yang demikian inilah yang mendorong sebagian dari mereka untuk mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras, jalan pintas tindak kriminal, pencurian, perampokan, penodongan, dan pemerkosaan mewarnai kehidupan masyarakat industri. Dalam keadaan seperti ini angka kriminalitas akan naik.

d. Sosial Budaya

Orang yang bekerja dalam bidang industri pada umumnya dibatasi oleh waktu yang ketat agar produksi yang tinggi dapat dicapai. Bila perlu kerja lembur atau kerja bergilir dilakukan bagi para pekerja. Kesemuanya dilakukan untuk memperoleh tingkat produksi yang tinggi. Suasana kerja di pabrik pada umumnya bising dan pemandangan yang tampak hanyalah peralatan dan mesin yang itu-itu juga. Keadaan yang seperti ini menyebabkan pekerja di pabrik mudah dihinggapi stress. Penyakit ketegangan jiwa dapat berlanjut menjadi penyakit hipertensi, penyakit jantung dan penyakit lainnya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh keadaan seperti tersebut di atas sering disebut sebagai environmental disease yang pengobatannya memerlukan pendekatan dari berbagai macam aspek sosial kemasyarakatan. Untuk mengatasi ketegangan jiwa (stress) seperti tersebut di atas, orang berusaha menurunkannya dengan mengunjungi tempat-tempat hiburan, bioskop, diskotek dan lain sebagainya. Sering kali pula untuk mengurangi atau melupakan ketegangan tersebut mereka minum minuman keras yang dapat berlanjut pada tindakan-tindakan kekerasan. Pertunjukan di tempat hiburan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

apakah juga tidak sesuai dengan budaya kita, bahkan tidak jarang yang menjurus

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ke arah pornografi yang pada akhirnya dapat membawa ke arah prostitusi. Berkembangnya tempat-tempat hiburan dengan segala kelengkapannya seperti tersebut di muka sudah barang tentu berdampak pada sosial budaya sekitarnya.

2. Dampak Langsung Dari Kegiatan Industri dan Tehnologi.

Perkembangan industri yang pesat dewasa ini tidak lain karena penerapan kemajuan teknologi oleh manusia guna mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Industri dan teknologi dimanfaatkan oleh manusia untuk mengolah kekayaan alam yang ada. Udara, air, tanah dan segala kekayaan yang ada di dalamnya dicari, diaduk dan diolah sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Kegiatan suatu industri dan teknologi dapat berjalan baik dan berkesinambungan apabila unsur-unsur pokok penunjang kegiatan industri dan teknologi tersedia. Tanpa adanya unsur-unsur pokok penunjang kegiatan tersebut, industri dan teknologi tidak akan dapat berjalan. Adapun unsur-unsur pokok yang dimaksudkan tersebut adalah :

1. Sumber daya alam, seperti bahan baku, air, energi dan lain sebagainya,
2. Sumber daya manusia, meliputi tenaga kerja dan keahlian,
3. Sarana dan prasarana seperti lahan dan peralatannya.

Ketiga unsur pokok tersebut saling berinteraksi sehingga kegiatan industri dan teknologi dapat berlangsung. Semua kegiatan dalam bidang industri dan teknologi yang mulanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, ternyata

pada sisi lain dapat menimbulkan dampak yang justru merugikan kelangsungan hidup

manusia. Dampak yang menimbulkan kerugian harus dicegah. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh kegiatan industri dan teknologi.

Apabila keseimbangan lingkungan terganggu maka kualitas lingkungan juga berubah. Padahal kenyamanan hidup banyak ditentukan oleh daya dukung alam atau kualitas lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup manusia.

Pada saat ketiga unsur pokok penunjang kegiatan industri dan teknologi saling berinteraksi antara komponen-komponen ekosistem, yaitu tanaman, hewan, manusia dan lingkungannya. Komponen ekosistem yang saling berinteraksi tersebut ada yang menyesuaikan diri, ada yang bekerjasama, ada yang bersifat menyerang, ada yang melindungi diri dan ada yang berusaha menguasai lainnya. Akan tetapi pada suatu saat kekuatan-kekuatan yang ada pada komponen ekosistem tersebut akan menuju ke arah keseimbangan.

Secara alami keadaan keseimbangan dapat dicapai dengan sendirinya, akan tetapi tetap memerlukan waktu yang cukup lama. Ekosistem, seperti halnya organisme, mempunyai kemampuan untuk mengatur dan memulihkan dirinya apabila terjadi gangguan. Keseimbangan dapat dipercepat oleh campur tangan manusia. Mengingat kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal disebabkan oleh ulah manusia maka manusia secara moral berkewajiban untuk mempercepat proses agar keadaan keseimbangan segera tercapai. Apabila dampak langsung kegiatan industri dan teknologi bisa dikurangi atau dihindari, berarti manusia sudah berusaha mempercepat terjadi keseimbangan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan teknologi dapat memberikan dampak langsung, di

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat perkotaan dalam bidang kebersihan pada dasarnya merupakan partisipasi pasif dimana masyarakat menganggap perbuatan-perbuatan melakukan kewajiban membayar retribusi sampah adalah suatu sistem partisipasi yang dapat mendukung program kebersihan yang dijalankan oleh pemerintah.
2. Tingkat partisipasi masyarakat perkotaan dalam bentuk gotong royong di bidang kebersihan semakin berkurang nilainya. Hal ini disebabkan tingkat kehidupan kota yang lebih mementingkan sisi efisiensi waktu dan individualistis.
3. Permasalahan kebersihan bukan semata-mata permasalahan pengelolaan sampah tetapi mencakup hal yang lebih luas lagi yaitu permasalahan lingkungan. Sedangkan permasalahan lingkungan tidak hanya mencakupi permasalahan sekeliling semata tetapi mencakup hal ikhwal yang terjadi pada suatu lingkungan tertentu serta perubahan-perubahan dari lingkungan itu sendiri.
4. Perihal rusaknya lingkungan hidup bukan hanya semata-mata perihal tercemarnya udara, air maupun rusaknya hutan, tetapi juga meliputi

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan permasalahannya, yaitu efek-efek dari aktivitas industri maupun

teknologi, seperti urbanisasi, perilaku, kriminalitas, sosial budaya dan lain sebagainya.



B. Saran

1. Bagi masyarakat Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara hendaknya lebih dapat meningkatkan partisipasinya di bidang kebersihan dengan tidak menyerahkan semata-mata kepada Dinas Kebersihan tetapi turut melakukan kerjasama dengan cara meletakkan sampah pada tempat-tempat yang disediakan serta mengemas sampah menjadi lebih baik lagi.
2. Bagi aparatur pemerintahan Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara dan pemerintah Binjai Utara hendaknya dapat lebih aktif melakukan penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup bagi masa depan masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Abdurrachman, *Pengembangan Azas dan Sistem Hukum Lingkungan*, Makalah pada Konpersi Pusat Study Lingkungan Seluruh Indonesia, Jakarta, 2001.
- Agustoha R. Kustoha, *Managemen Pembangunan Desa*, Penerbit Grafindo, Jakarta, 2005.
- BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung, 2007.
- Departemen Penerangan RI, *Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 2011*, Jakarta.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2002.
- Ghajali, *Menggalakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan*, Socilia, Jakarta, 2009.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM, Yogyakarta, 2011.
- Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 2002.
- J. Wayong, *Fungsi Administrasi Negara*, Djambatan, 2011.
- Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, remadja Karya, Bandung, 2005.
- Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 2004.
- Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 2009.
- Mutawali, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, Ditbangdes Prop. Dati II Jabar, Bandung, 2009.
- Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Makalah pada Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, BPHN, Bina Cipta Bandung, 2007.

- Pariata Westra, *Hubungan Kerja Kemamusiaan*, Balai Pembinaan Administrasi UGM, Yogyakarta, 2007.
- R.A. Santoso Poetro, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 2006.
- S.P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2009.
- _____, *Proses Pengelola dan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Suwignyo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Taliziduhu Ndraha, *Hubungan Antara Partisipasi dan Tanggung Jawab Terhadap Hasil-Hasil Pembangunan*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2011.
- _____, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2011.
- _____, *Metodologi Pembangunan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- _____, *Pengertian Desa dan Pembangunan Desa*, Yayasan Karya Darma II, Jakarta, 2007.
- Winardi, *Asas-Asas Managemen*, Alumni, Bandung, 2011.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2005.